



**LAPORAN KINERJA
BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS I
PALEMBANG**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian dibidang penggunaan frekuensi radio diwilayahnya masing-masing. Dengan tugas dan tanggung jawab yang sangat strategis tersebut harus dapat diwujudkan dalam bentuk kontribusi yang konkret dan menyentuh kepentingan seluruh stakeholder. Sebagai implementasinya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang telah menyusun Program Kerja dan Kegiatan tahun 2018 disesuaikan dengan target/capaian yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap capaian Program Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang, dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam table dibawah ini:

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan SFR serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) Jumlah Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor	80%	100,00%	125,00%
		2. Persentase (%) Stasiun Radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	52,27%	136,34%
		3. Persentase (%) Aduan/Klaim gangguan yang dapat diselesaikan	94%	100,00%	106,38%
		4. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah Provinsi Sumsel	81%	100,00%	123,46%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	83%	52,34%	64,27%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di Balmon Kelas I Palembang	83%	90,00%	108,43%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST, dan ISR oleh Balmon Kelas I Palembang	100%	100,00%	100,00%
		8. Persentasi (%) terlaksananya UNAR	100%	100,00%	100,00%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif.	1. % Pelaksanaan Pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi radio	100%	100,00%	100,00%
		2. Persentase (%) Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100,00%	100,00%

*Note : (5) didapat dari nilai (4) dibagi (3)

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini. Sedangkan penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Pada Sasaran Kinerja I **“Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio”** terdapat 8 (delapan) indikator kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor

Pada tahun 2018, target yang harus dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang yakni 80%, yang direncanakan dapat dicapai melalui 22 kali kegiatan observasi dan monitoring bergerak frekuensi, baik didalam kota maupun diluar kota dari 17 kabupaten/kota. Terhitung sampai dengan November 2018, ke 17 Kabupaten/Kota keseluruhannya kegiatan sebanyak 22 kali telah direalisasikan, dengan capaian/realisasinya adalah 100.00% .

Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR

Di Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang, dari bulan Januari sampai dengan November 2018 telah dilakukan pengukuran frekuensi radio sebanyak 8 (delapan) kali kegiatan dari target jumlah kegiatan sebanyak 8 kali. Dari hasil pengukuran yang telah dilaksanakan realisasi capaian sebesar 47,72% atau diatas target 35% stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan data ISR.

Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan.

Pada tahun 2018 pula, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang menargetkan 94% upaya pengaduan/klaim yang diselesaikan harus terlaksana. Aduan/Klaim tersebut diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan kegiatan penanganan gangguan sebanyak 6 (enam) kegiatan. Dari pelaksanaan kegiatan yang ada Balmon Kelas I Palembang telah menangani aduan/klaim gangguan sebanyak 10 aduan laporan dan semuanya telah diselesaikan atau 100,00(%).

Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT.

Pada tahun 2018, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang menargetkan 85% untuk upaya kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT. Dari target tersebut pada November 2018 sudah tercatat sebesar 85% dari 4 kali total realisasi kegiatan yang diajukan baik didalam/diluar kota. Dengan demikian dapat dikatakan capaian indikator Presentase (%) jumlah kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR.

Dalam rangka menyesuaikan data frekuensi bagi pemegang ISR, Balmon SFR Kelas I Palembang melakukan kegiatan inspeksi lapangan dengan target capaian sebesar 81%. Target dimaksud diharapkan dapat dicapai dengan melaksanakan kegiatan Inspeksi sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 hasil ataupun capaian kegiatan inspeksi terhadap kesesuaian data ISR adalah sebesar 52,34% atau dibawah realisasi yang seharusnya 81%.

Persentase (%) berfungsi perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT

Untuk menjaga kondisi peralatan dan perangkat pendukung kegiatan monitoring/pengukuran dilakukan pemeliharaan baik yang dilakukan secara rutin maupun terhadap perangkat yang mengalami kerusakan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 kondisi peralatan/perangkat untuk mendukung kegiatan monitoring/pengukuran, dari 10 (sepuluh) alat ukur yang ada, 9 (sembilan) diantaranya atau 90% berada dalam kondisi baik, dari target yang ditetapkan sebesar 83%.

Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT

Untuk pelaporan terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang sudah direalisasikan 100%, dengan pengertian seluruh SPP, ST, dan ISR sudah disampaikan ke pemegang Izin.

Persentase (%) terlaksananya kegiatan UNAR oleh UPT

Sedangkan untuk pelaporan terlaksananya UNAR, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang sudah 100% melakukan pencapaian target dari 1 kali kegiatan UNAR yang telah dilakukan yakni UNAR di Kabupaten OKU Selatan pada tanggal 14 s/d 16 April 2018.

Pada Sasaran Program II **“Terwujudkannya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif”** terdapat 2 (dua) indikator kinerja, berikut ringkasan capaian masing-masing indikator.

Pada tahun 2018, dilakukan 2 (dua) kegiatan tata kelola UPT Monspekfrekrad (yang merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya) pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang. Dua kegiatan survei tersebut adalah pelaksanaan pendampingan pengurusan piutang BHP frekuensi radio dan pelayanan administrasi.

Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio, Balai Monitor SFR Kelas I Palembang dari Januari hingga November 2018 tercatat sudah 81.45% melakukan capaian target.

Persentase (%) Layanan Administrasi

Pelayanan administrasi kantor telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, sampai dengan akhir Desember 2018 realisasi/capaian akhir adalah sebesar 100.00%.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barokaatuh

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor SFR Kelas I Palembang) Tahun 2018 disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini menyajikan capaian kinerja (performance results) Balai Monitor SFR Kelas I Palembang selama tahun 2018, yang diperbandingkan dengan penetapan kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan di masa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balmon SFR Kelas I Palembang Tahun 2018 selain memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Balmon SFR Kelas I Palembang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam kerangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun secara umum hasil capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan di Balmon SFR Kelas I Palembang Tahun 2018 dapat memenuhi target, namun tidak dapat pula kami pungkiri masih ada beberapa indikator kinerja yang masih perlu dioptimalkan.

Kami berharap analisis dan evaluasi Laporan Balmon SFR Kelas I Palembang Tahun 2018 dapat memberikan dorongan dan semangat dari seluruh komponen khususnya di lingkungan Balmon SFR Kelas I Palembang sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai UPT Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika secara nasional dapat berjalan dengan baik dan benar yang pada akhirnya mempercepat perwujudan Good Governance dan Clean Government khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Balmon Kelas I Palembang dalam rangka pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan frekuensi radio di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2019
KEPALA BALMON SFR KELAS I PALEMBANG

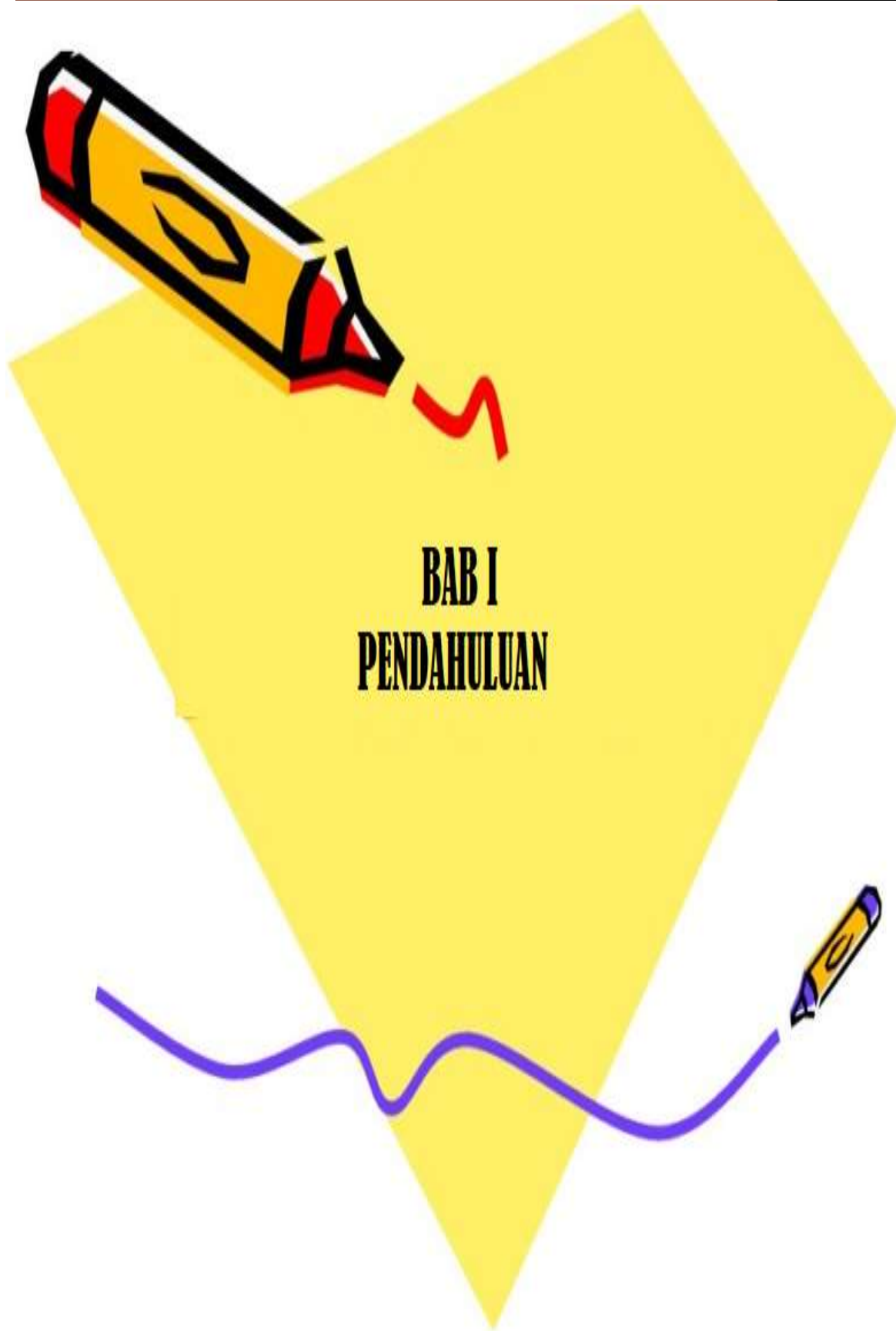
Ir. MUHAMMAD SOPINGI,MM

DAFTAR ISI*halaman*

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. LATAR BELAKANG	10
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	9
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	15
D. SISTEMATIKA PELAPORAN.	15
BAB IIPERJANJIAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019	18
B. SASARAN PROGRAM	18
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	22
SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO	22
1. IK-1 Persentase (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor.....	23
2. IK-2 Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR	1
3. IK-3 Persentase (%) Jumlah Aduan/Klaim yang diselesaikan	25
4. IK-4 Persentasi (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radiio di wilayah UPT.....	25
5. IK-5 Persentasi (%) Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR.....	25
6. IK-4 Persentasi (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitor/ Ukur UPT.....	25
7. IK-4 Persentasi (%) Terdistribusinya SPP, ST, dan ISR oleh UPT.....	25
8. IK-4 Persentasi (%)Terlaksananya Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)	25

SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONSPEK FREK RAD YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF	20
1. IK-5 Persentase (%) Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio	Error! Bookmark not defined. 23
2. IK-6 Persentase (%) Layanan Administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan.....	34
B. KINERJA LAINNYA	55
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Telekomunikasi.....	26
2. Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio dalam rangka Event Asian Games XVIII	57
C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 s.d. 2018.....	58
D. ANALISA DAN EVALUASI	Error! Bookmark not defined. 58
BAB IV PENUTUP	64
DAFTAR LAMPIRAN	





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Balai Monitor SFR Kelas I Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun 2018 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan memacu peningkatan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat / peralatan monitor spektrum frekuensi radio;
- b. Melaksanakan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan / monitor spektrum frekuensi radio;
- c. Melaksanakan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- d. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis monitor spektrum frekuensi radio;
- e. Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
- f. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- g. Pelayanan / pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio; dan
- h. Melaksanakan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, keruahtanggaan dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban

Mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data pengguna frekuensi radio.

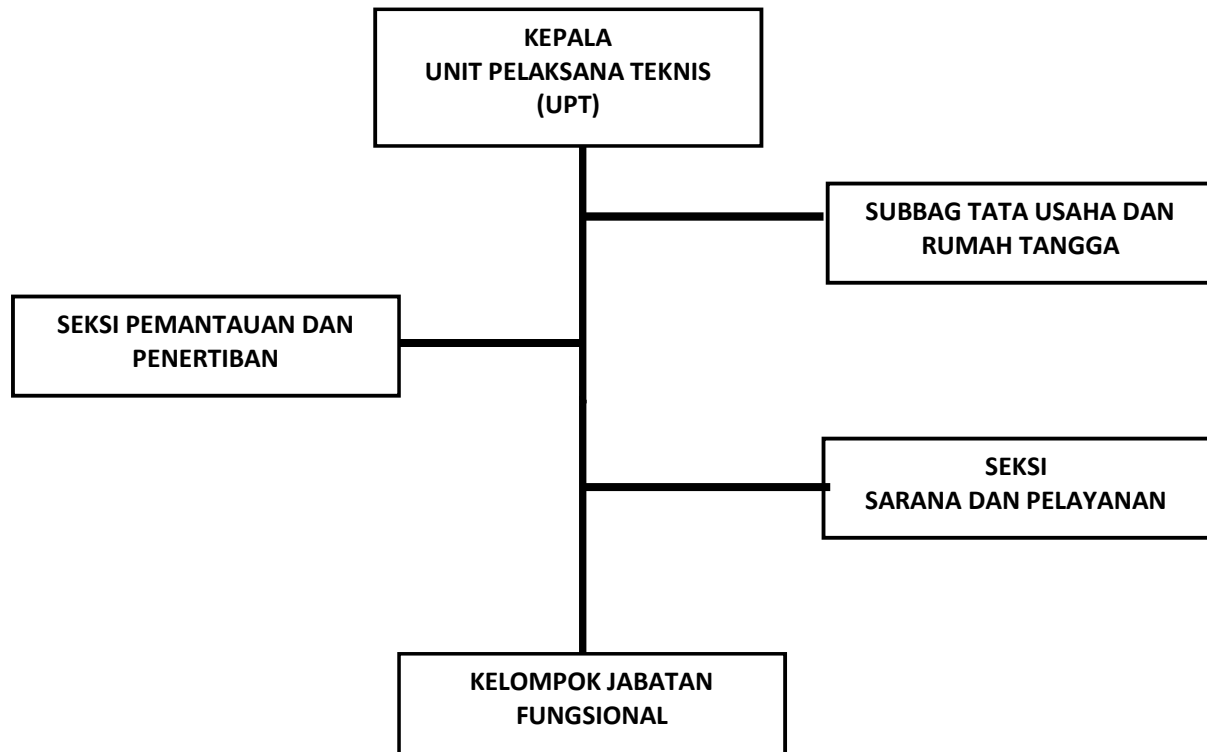
3. Seksi Sarana dan Pelayanan

Mempunyai tugas menyampaikan Izin Stasiun Radio (ISR), Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, Pendampingan Penyelesaian Piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio, Pelayanan Gangguan Masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun bagan struktur organisasi Balai Monitor SFR Kelas I Palembang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar Struktur Organisasi Balmon SFR Kelas I Palembang

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 juga telah diatur bahwa Wilayah Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Palembang adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 91.806,36 km², dan berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara, Provinsi Lampung di sebelah selatan, Provinsi Bangka Belitung di sebelah timur dan Provinsi Bengkulu di sebelah barat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 Provinsi Sumatera Selatan secara administratif dibagi menjadi 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota, serta 228 kecamatan. Selanjutnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir (PALI), dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Musi Rawas Utara, maka Provinsi Sumatera Selatan secara administratif menjadi 13 (tiga belas) Kabupaten dan 4 (empat) Kota dengan jumlah desa sebanyak 2.823 desa, 363 kelurahan dan 231 kecamatan.

Tabel 1.1
Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan,
Di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Banyuasin	Pangkalan Balai	19	11,832.99
2	Empat Lawang	Tebing Tinggi	10	2,256.44
3	Lahat	Lahat	22	5,311.74
4	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	8	401.50
5	Muara Enim	Muara Enim	20	7,383.90
6	Musi Banyuasin	Sekayu	14	14,266.26
7	Musi Rawas	Muara Beliti	14	6,350.00
8	Ogan Ilir	Indralaya	16	2,666.07
9	Ogan Komering Ilir	Kota Kayu Agung	18	18,359.04
10	Ogan Komering Ulu	Baturaja	12	4,797.06
11	OKU Selatan	Muaradua	19	5,493.94
12	OKU Timur	Martapura	20	3,370.00
13	Pagar Alam	Pagar Alam	5	633.66
14	Palembang	Palembang	16	400.61
15	Prabumulih	Prabumulih	6	434.50
16	Penukal Abad Lematang Ilir*	Talang Ubi	5	1,840.00
17	Musi Rawas Utara**	Rupit	7	6,008.65
TOTAL.....			231	91,806.65

Sumber : Permendagri No. 6 Tahun 2008

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1° 37' 27'' sampai 4° 55' 17'' Lintang Selatan dan antara 102° 3' 54' dan dialiri banyak sungai besar dan kecil dengan kekayaan sumber daya yang melimpah antara lain minyak bumi, batu bara dan gas alam. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa sungai besar. Kebanyakan sungai - sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi. Sungai Musi merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera dengan panjang sekitar 750 km menjadi tempat yang subur bagi budi daya pertanian dan perikanan, dan penghubung bagi perdagangan antar daerah sejak jaman kerajaan Sriwijaya, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi. Dengan letak geografis yang strategis, Sumatera Selatan menjadi salah satu pusat pertemuan dan interaksi para

pedagang-pedagang asing terutama dari Arab, India dan Cina. Letak geografis ini memberikan peluang bagi Sumatera Selatan untuk cepat maju dan berkembang.

Secara topografi, wilayah Propinsi Sumatera Selatan di Pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk kedalam wilayahnya semakin bergunung-gunung.

Disana terdapat Bukit Barisan yang membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900 – 1.200 meter dari permukaan laut. Bukit barisan terdiri atas puncak Gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107 m) dan Gunung Bangkuk (2.125 m). Disebelah Barat Bukit Barisan merupakan Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107 m) dan Gunung Bangkuk (2.125 m). Disebelah Barat Bukit Barisan merupakan lereng.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Spektrum Frekuensi merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga pemanfaatan dan pengelolaannya harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, diantaranya efisiensi namun dengan hasil dan kontribusi yang maksimal yakni pendapatan negara bukan pajak yang terus meningkat yang selanjutnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Hambatan dan tantangan dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi khususnya di wilayah provinsi Sumatera Selatan antara lain :

- a. Permintaan layanan aduan terhadap gangguan penggunaan frekuensi dengan yang jumlah berfluktuasi dan tidak bisa diprediksi (**unpredictable**), demikian juga permintaan layanan untuk melakukan pengukuran stasiun radio/tv siaran, padahal hal ini sangat penting dikarenakan menyangkut penganggaran, terutama kegiatan yang lokasinya harus dilaksanakan di luar kota. Sedangkan kegiatan yang berada di dalam kota masih bisa direalisasikan melalui kegiatan rutin.

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya pengguna frekuensi radio. Hal ini bisa dilihat dari indikasi masih sering ditemukan adanya pelanggaran pengguna frekuensi di lapangan. Baik penyimpangan penggunaan frekuensi maupun penggunaan frekuensi tanpa izin (illegal)
- c. Kebijakan penghematan anggaran yang selanjutnya berdampak pada pengurangan kegiatan, akan mengurangi efektivitas pelaksanaan Tugas dan fungsi UPT di lapangan.
- d. Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi teknis yang memadai.
- e. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah daerah maupun stakeholder/mitra kerja berjalan sangat baik, kondisi ini tentunya menjadi modal dasar bagi peningkatan kerja sama yang lebih baik dimasa yang akan datang,

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB III PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 15 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 2 Tahun 2018 tugas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal SDPPI adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan perpanjangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu mengacu dan mempedomani visi Indonesia Hebat dalam RPJM Tahap III, yakni:

Terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi persyaratan teknis.

Visi Indonesia Hebat selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015 – 2019, yang terkait dengan tugas dan fungsi Ditjen SDPPI, yakni :

- Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia
- Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif

Maka sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi dasar bagi perumusan tujuan program Ditjen SDPPI 2015 – 2019 adalah ***tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.***

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor SFR Kelas I Palembang, dalam mendukung tercapainya renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi Program kerja utama yang akan dilaksanakan secara terencana dan sistematis adalah **Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika**.

B. SASARAN PROGRAM

Adapun yang menjadi sasaran program kerja Balai Monitor SFR Kelas I Palembang adalah Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang professional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja dibuat dengan tujuan antara lain adalah untuk:

- meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

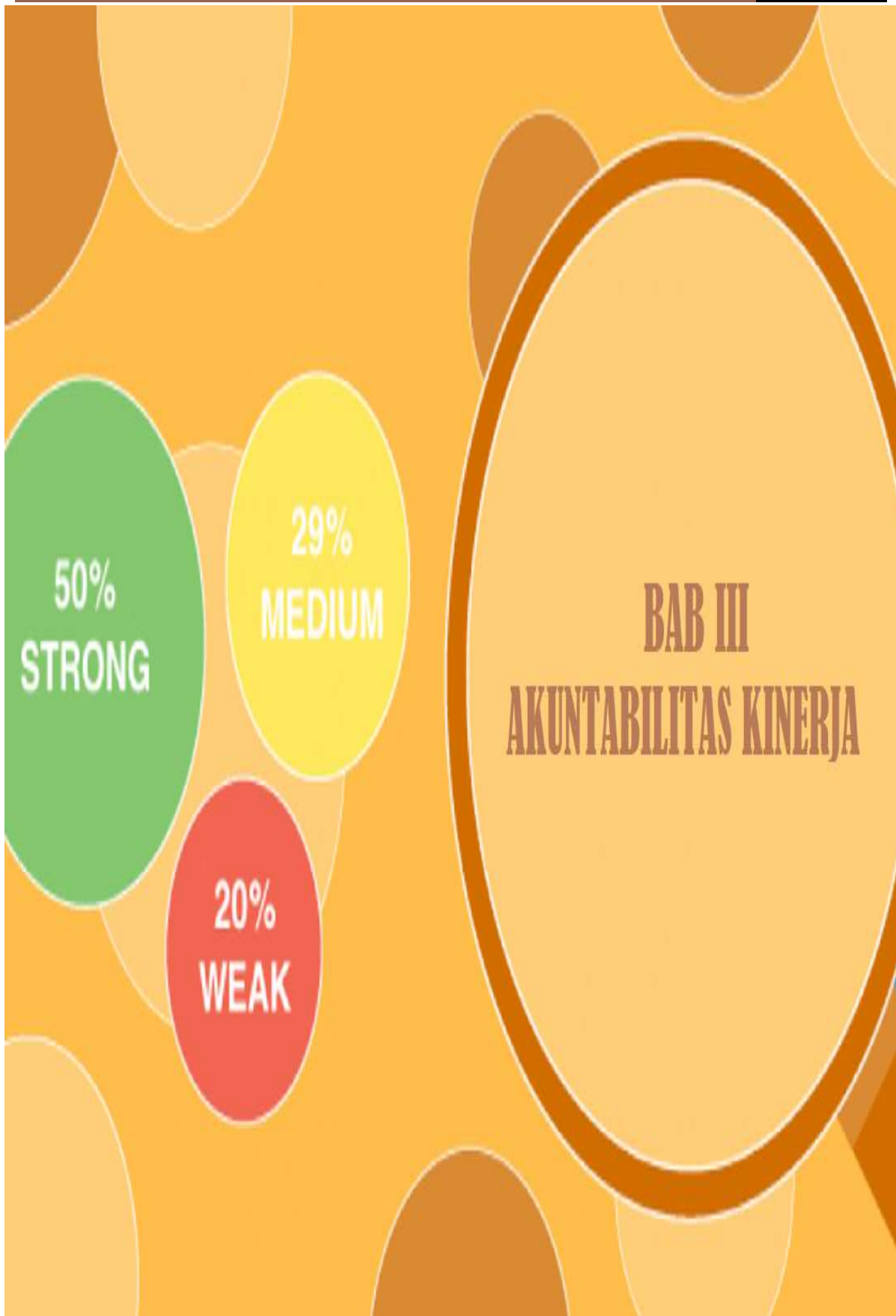
Adapun sasaran program, Indikator kinerja serta target capaian kinerja dalam tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum	Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat di monitor	80%
		Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR	35%
		Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%
		Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	85%

	Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio pada 17 Kabupaten/ Kota	Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%
		Persentase (%) berfungsi perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT	83%
		Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%
		Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum	Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%
	Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja dalam pelaksanaan program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 11.152.087.000,- (sebelas milyar seratus lima puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu ruiah dengan rincian:

- Rupiah Murni (RM) Rp. 4.429.544.000,-
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 6.622.643.000,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2018 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Balai Monitor SFR Kelas I Palembang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Palembang pada tahun 2018 setelah dilakukan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan realisasi capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio pada 17 Kabupaten/Kota	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat di monitor	80%	100%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR	35%	100%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%	100%
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	85%	100%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	52,34%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT	83%	100%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%

SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO

Tercapainya sasaran Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi 17 Kab/Kota, dapat dilihat dari perbandingan antara target dengan persentase (%) capaian/ realisasi pada 8 (delapan) Indikator Kinerja:

- Persentase (%) kabupaten/Kota yang dapat dimonitor
- Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR
- Persentase (%) jumlah aduan/klaime yang diselesaikan
- Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT
- Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR
- Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT
- Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT.
- Persentase (%) terlaksana Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

1. IK-1 Persentase (%) Kab/Kota yang dapat dimonitor

Indikator Kinerja **Persentase (%) Kab/Kota yang dapat dimonitor** memiliki target sebesar 80% persen atau 14 Kab/Kota dari seluruh Kab/kota yang ada diwilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 17 Kabupaten/Kota. Dari data yang ada pelaksanaan kegiatan Observasi dan Monitoring bergerak Frekuensi radio pada tahun 2018 yang berjumlah 22 kegiatan, kegiatan yang telah dilaksanakan sudah mencakup seluruh Kabupaten/Kota yang ada yakni sebanyak 17 Kabupaten/Kota. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa target pada **Indikator Kinerja tersebut telah tercapai.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan penertiban penggunaan frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio	Persentase (%) Kab/Kota yang dapat dimonitor	80,00%	100,00%	125,00%

Hasil pelaksanaan kegiatan Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Wilayah kabupaten/kota termonitor

Dinas Termonitor	Wilayah Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan																					
	Kota Palembang		Kota Prabumulih		Kota Lubuk Linggau		Kota Pagar Alam		Kab. Muba		Kab. Banyuwasin		Kab. Lahat		Kab. Muara Enim		Kab. Pali		Kab. Empat Lawang		Kab. OKI	
	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL
Marabahaya & panggilan (485 – 505 kHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Radio AM (535 – 1606.5 kHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marabahaya & panggilan (2173.5 – 2180.5 kHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amatir HF, Airband HF (8525 – 7200 kHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Airband HF, Konsesi HF (11275 – 11600 kHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KRAP HF (26880 – 27410 kHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Radio FM (87.8 – 108 MHz)	20	-	6	-	7	-	7	-	-	-	16	-	3	-	10	-	4	-	1	-	10	-
Airband VHF (108 – 137 MHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konsesi Amatir, KRAP, Maritim (137 – 174 MHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Televisi VHF, DAB+ (174 – 230 MHz)	36	-	3	-	11	-	20	-	-	-	1	-	2	-	6	-	4	-	1	-	5	-
Konsesi UHF, Trunking, Radio Penentu (350 – 430 MHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Termonitor	Wilayah Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan																							
	Kota Palembang		Kota Prabumulih		Kota Lubuk Linggau		Kota Pagar Alam		Kab. Muba		Kab. Banyuasin		Kab. Lahat		Kab. Muara Enim		Kab. Pali		Kab. Empat Lawang		Kab. OKI		Kab. Ogan Ilir	
	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL	LEGAL	ILEGAL
Selular 450, Konsesi (430 – 470 MHz)	17	-	2	-	10	-	2	-	-	-	1	-	3	-	7	-	1	-	-	-	5	-	2	-
Televisi UHF (470 – 808 MHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trunking, Selular 800 (808 – 880 MHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selular 800 (880 – 960 MHz)	20	-	18	-	6	-	5	-	-	-	15	-	8	-	4	-	6	-	1	-	4	-	8	-
Selular 1800 (1805 – 1880 MHz)	10	-	16	-	5	-	4	-	-	-	10	-	9	-	4	-	10	-	-	-	7	-	5	-
Selular 2100 (2110 – 2170 MHz)	9	-	8	-	8	-	5	-	-	-	15	-	8	-	4	-	6	-	-	-	4	-	8	-
BWA 2300 (2300 – 2400 MHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiFi 2400 (2400 – 2500 MHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSS/Siaran Satelit (2620 – 2870 MHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BWA 3300 (3300 – 3400 MHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Legal 555																								
Total ilegal 0																								

Hasil monitoring tersebut sebanyak 555 frekuensi dengan dengan penjelasan bahwa dari seluruh pengguna yakni 555 pengguna/ISR semuanya legal dan tidak ditemukan frekuensi yang ilegal.

2. IK-2 Persentase (%) Stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR.

Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR memiliki target sebesar 35%. Sepanjang tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang telah melaksanakan pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sejumlah 21 stasiun dari 44 stasiun yang sesuai ISR. dengan demikian Indikator Kinerja Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai ISR telah tercapai melebihi target yaitu 47,72% dari 35% yang ditargetkan.

Kegiatan pengukuran ini dilakukan apabila ada permintaan dari Kantor Pusat untuk melakukan pengukuran terhadap parameter teknis Radio/TV Siaran yang akan dilakukan untuk kepentingan Evaluasi dan Uji Coba Siaran (EUCS)

dan Forum Rapat Bersama (FRB) pada Stasiun Radio yang akan diproses lebih lanjut perizinannya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan penerbitan penggunaan frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio	Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35,00%	47,72%	136,34%

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Stasiun Radio Siaran dan TV Siaran Tahun 2018

No	Wilayah Kab/Kota	Jumlah ISR Broadcasting	Radio FM		TV Siaran	
			Terukur	Tidak terukur	Terukur	Tidak terukur
1	Kota Palembang	40	2	18	9	11
2	Kota Prabumulih	8	-	-	-	-
3	Kota Lubuk Linggau	7	4	1	-	3
4	Kota Pagar Alam	4	1	3	-	-
5	Kab. Musi Banyuasin	11	1	6	3	2
6	Kab. Banyuasin	6	1	5	-	-
7	Kab. OKI	3	-	-	-	-
8	Kab. Ogan Ilir	4	-	-	-	-
9	Kab. Muara Enim	4	1	3	-	-
10	Kab. OKU	4	-	-	-	-
11	Kab. OKU Timur	5	-	-	-	-
12	Kab. OKU Selatan	1	-	-	-	-
13	Kab. Lahat	2	-	-	-	-
14	Kab. Pali	3	1	2	-	-
15	Kab. Empat Lawang	1	-	-	-	-
16	Kab. Musi Rawas	2	-	-	-	-
17	Kab. Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-
Total ISR Terukur		105	11	38	12	15

3. IK-3 Persentase (%) Aduan/Klaim yang dapat diselesaikan.

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio diukur dengan membandingkan antara jumlah laporan aduan gangguan yang masuk dengan jumlah gangguan yang dapat tertangani sampai dengan selesai/clear. **Sepanjang tahun 2018 seluruh aduan/klaim terkait dengan gangguan penggunaan frekuensi radio dengan jumlah 10 Aduan, semuanya telah diselesaikan (100,00%) dari target 94% target yang telah ditetapkan.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan penertiban penggunaan frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio	Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	94%	100,00%	106,38%

Frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, oleh sebab itu penggunaan dan pemanfaatannya diatur serta ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio harus dilaksanakan demi terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan indikator diantaranya penggunaan frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya.

Hasil prosentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dihitung berdasarkan atas Jumlah Hasil Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi yang telah Selesai ditangani berbanding dengan Jumlah Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi.

Hasil pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan penggunaan frekuensi radio dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 3.3
Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Tahun 2018

No	Bulan	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Januari 2018	-	-
2	Februari 2018	Penanganan gangguan frekuensi radio pada tanggal 20 s.d. 24 Februari 2018. - Hotel Grand Zuri, Muara Enim - PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk. Lumut Basai	Ada sesuai Berita Acara Penanganan Gangguan Frekuensi Radio tertanggal 01 Oktober 2018.

No	Bulan	Uraian Kegiatan	Keterangan
3	Maret 2018	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio pada tanggal 20 s.d. 24 Maret 2018. - PT. Madhani Talatah Nusantara	Belum clear dan masih dalam proses penyelesaian.
4	April s.d. Juni 2018	-	-
5	Juli 2018	Penanganan Gangguan Radar pada tanggal 02 s.d. 07 juli 2018 dan tanggal 09 s.d. 11 Juli 2018. - BMKG Palembang	Gangguan dinyatakan clear/bersih sesuai dengan Berita Acara Berita Acara Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio tertanggal 12 juli 2018.

Dari hasil prosentasi pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan, dari 10 aduan, semuanya dapat diselesaikan dengan tuntas (100,00%), yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Penanganan Gangguan ataupun surat dari Perusahaan yang bersangkutan yang menyatakan gangguan frekuensi dinyatakan bersih (clear).

4. IK-4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Penggunaan Frekuensi Radio.

Kegiatan operasi penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan dalam rangka terwujudnya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga penggunaan frekuensi dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peruntukannya. Hasil dari kegiatan Operasi Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio nantinya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi yang baik dengan instansi terkait untuk menentukan tingkat pelanggaran, apakah layak diproses sampai dengan tingkat pengadilan untuk pelanggaran yang masuk kategori berat dan tidak bisa dilakukan pembinaan lagi, sementara untuk pelanggaran yang masuk kategori ringan cukup diberikan pembinaan berupa surat peringatan serta pengarahan agar segera mengurus Perizinan (ISR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan Operasi Penertiban Pengguna Frekuensi radio dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan, di 4 (empat) kabupaten/Kota, dengan capaian Indikator Kinerja sebagai mana pada table dibawah ini:

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio pada 17 Kabupaten/Kota	Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	85%	100%	117,65%

Sedangkan capaian/hasil operasi penertiban yang telah dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten/Kota, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.4.
Hasil Penertiban Frekuensi Radio Tahun 2018

No	Wilayah Kab/Kota	Jumlah Target Operasi	Hasil Operasi			Tindak Lanjut		Keterangan
			Peringatan	Sita	ISR Lengkap	Pengurusan Izin	Proses Hukum	
1	Kab. OKI (02 s.d. 06 April 2018)	12	2	-	10	-	-	
2	Muara Enim (21 s.d. 25 Mei 2018)	15	1	-	14	-	-	
3	Kota Palembang (06 s.d. 10 Agustus 2018)	23	1	-	16	-	-	- 6 tidak ditemukan perangkat radio
4	Kab. Musi Banyuasin (05 s.d. 09 Oktober 2018)	20	3	-	17	-	-	

Hasil penertiban sebagaimana tersebut pada tabel diatas telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi hasil penertiban untuk mengklarifikasi pelanggaran tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio serta menyusun analisa secara hukum, dengan hasil sebagaimana berikut:

Tabel 3.5
Hasil Tindak Lanjut Hasil Penertiban Tahun 2018

	Jumlah Hasil Tindak Lanjut	Tindak Lanjut			Keterangan
		Pengurusan izin	Proses Hukum		
			SP3	P21	
1	Saipul Anwar	-	-	-	Menghentikan/off air pemancar radio dan melakukan penyegelan di tempat
2	PT. Waskita Karya (Persero)	-	-	-	Diperingatkan agar segera mengurus mutasi alamat ISR/Perluasan jaringan
3	PT. United Tractor	1	-	-	Izin Terlampir
4	PT. Kirana Musi Persada	-	-	-	Diperingatkan untuk segera mengurus HT yang tidak sesuai datanya pada ISR
5	PT. Mobikom Telekomindo	-	-	-	Diperingatkan agar segera menyesuaikan frekuensi yang digunakan sesuai dengan ISR
6	PT. Global Makara Teknik	-	-	-	Diperingatkan agar segera menyesuaikan frekuensi yang digunakan sesuai dengan ISR

5. IK-5 Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dan Data Hasil ISR.

Kegiatan Inspeksi dilakukan dengan membandingkan data frekuensi frekuensi radio yang digunakan oleh pengguna spektrum frekuensi di lapangan dengan data yang ada dalam database (SIMS) pengguna frekuensi radio yang dikeluarkan oleh Direktorat Operasi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Kegiatan inspeksi ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui dan melihat ketaatan para pengguna frekuensi (yang telah mempunyai ISR), disamping untuk meminimalisir gangguan frekuensi sebagai akibat adanya penyimpangan penggunaan frekuensi radio. Dengan tujuan akhir mewujudkan terciptanya tertib penggunaan frekuensi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan mengacu kepada target capaian kinerja, untuk kegiatan inspeksi dalam rangka validasi data pengguna frekuensi radio telah ditetapkan sebesar 81,00%. Namun sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, persentase capaian kinerja yang hanya sebesar 52,34%. Realisasi tersebut masih dibawah target yang telah ditentukan dengan deviasi/selisih sebesar 28,66%.

Untuk tahun 2018, persentase capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan Inspeksi ini dapat dilihat dari hasil sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan penertiban penggunaan frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio	Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	52,34%	64,62%

Kegiatan Inspeksi dalam rangka validasi data ini dilakukan di 16 Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pelaksanaan inspeksi/validasi pengguna frekuensi radio Tahun 2018

NO	BULAN	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH STASIUN RADIO YANG DIINSPEKSI	JUMLAH STASIUN RADIO SESUAI ISR	NAMA STASIUN RADIO	STATUS
1	Januari 2018	-	-	-	-	-
2	Februari 2018	Ogan Komering Ulu	274	68	- Semen Baturaja (Persero), PT. - Personil Alih Daya, PT. - Kereta Api Indonesia (Persero), PT. - PLN (Persero), PT. - Matahari Putra Pratama, Tbk. PT - Matahari Departement Store, Tbk., PT.	Selesai dilaksanakan
		Prabumulih	48	47	- Radio Anugrah Dharma Bahan Citra, PT.. - Radio Pentas Taruna Sriwijaya, PT. - Radio Tribagus Putra Perkasa, PT. - Radio Trans Medan Palembang, PT. - Megah Bangun Lestari, PT. - Sibolga Medan Bersama, PT. - Radio Anugrah Dharma Bahan Citra, PT.. - PLN (Persero), PT. - Mobilkom Telekomindo, PT. - Elnusa, PT. - Multi Servisindo Sarana, PT.	
3	Maret 2018	OKU Selatan	23	23	- Radio Osela Mandiri, PT. - Ujang Fahmi (YD4LEU) - Herawadi (YD4LDH) - Radio Vania, PT. - PLN APD S2JB (Persero), PT. - Supardi (YD4LPL) - Siswanto (YD4LSW)	Selesai dilaksanakan

NO	BULAN	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH STASIUN RADIO YANG DIINSPEKSI	JUMLAH STASIUN RADIO SESUAI ISR	NAMA STASIUN RADIO	STATUS
4	April 2018	Lahat	246	96	- Radio Lemlitang Indah, PT. - Primaniaya Energi, PT. - PLN APD S2JB (Persero), PT. - Berkat, CV. - Muara alam Sejahtera, PT. - Prima Sarana Gemilang, PT. - Bukit Pembangkit Innovative, PT.. - Sinar Sakti Indonesia, PT..	Selesai dilaksanakan
5	Mei 2018	OKU Timur	194	158	- Laju Perdana Indah, PT. - Radio Swara Maspero, PT. - RRI Belitang, LPP - Radio Shimas Bersaudara, PT.. - Radio Bersatu Kita Maju, LPL - Musi Hutan Persada, PT.. - PLN Rayon Martapura (Persero), PT.	
6	Juni 2018	Muara Enim	247	247	- Puncak Mustika Bersama, PT. - PLN APD S2JB (Persero), PT. - Musi Rawas Lestari Makmur, PT. - Bara Anugrah Sejahtera, PT. - Manggala Usaha Manunggal, PT. - Swamadwipa Dermaga Jaya, PT.	
7	Juli 2018	Empat Lawang	26	11	- XL Axiata, PT. - Hutchinson 3 Indonesia, PT.	
8	Agustus 2018	Ogan Ilir	226	143	- Sumatera Prima Fibreboard, PT. - Universitas Sriwijaya - Perkebunan VII Cinta Manis, PT. - Swamadwipa Andalas, PT. - Ceraf Televisi Indonesia, PT. - Mahkota Ogan Sumatera, PT. - Radio Dwi Kembar Citra Ogan, PT. - Indosat, Tbk PT. - Smartfren Telecom, PT.	
		Banyuasin	458	199	- Telkomsel. PT. - Smartfren Telecom, PT.	

NO	BULAN	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH STASIUN RADIO YANG DIINSPEKSI	JUMLAH STASIUN RADIO SESUAI ISR	NAMA STASIUN RADIO	STATUS
9	September 2018	Lubuk Linggau	120	59	- - Arrisima Lianggau Televisi Media, PT. - Lingkaran Generasi Muda Creative, PT. - Radio Rajawali Bumi Selatan, PT. - Citra SM Sejahtera, CV. - Dewinta Bintang Indonesia, PT. - Radio Panca Pesona Jaya, PT. - Artha Moro Hotel, PT. - Indo Mega Sejahtera, PT. - Pariwisata Intan Sriwijaya, PT. - Telkomsel, PT. - Smartfren Telecom, PT.	
		Murataja	58	8	- Indosat, PT. - XL Axiata, PT.	
		Musi Rawas	127	8	- Telkomsel, PT. - Hutchinson 3 Indonesia, PT.	
10	Oktober 2018	Pali	51	29	- Telkomsel, PT.	
		Pagar Alam	12	5	- XL, Tbk, PT. - Smartfren, Tbk, PT.	
11	November 2018	Palembang	198	80	- XL Axiata, Tbk, PT. - Indosat Ooredoo, PT.	

NO	BULAN	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH STASIUN RADIO YANG DIINSPEKSI	JUMLAH STASIUN RADIO SESUAI ISR	NAMA STASIUN RADIO	STATUS
12	Desember 2018	Palembang	14	-	- Radio Swara Atmajaya., PT	
					- Swara Maseba Ariatara., PT	
					- Radio Momea., PT.	
					- Radio Gelora Ramona., PT.	
					- Radio Prima Elita., PT.	
					- Radio Swara Pesona., PT.	
					- Rama Sentra Utama Nian., PT.	
					- Radio Swara Sriwijaya Indah., PT.	
					- Radio Santana Musi Permai, PT	
					- Radio Hangtuh Jaya Raya., PT.	
					- Radio Lanugraha., PT.	
					- Radio LCBS., PT.	
					- Radio Warastra Bewara Swara., PT.	
					- Radio El John., PT.	
		OKI	254	99	- Telkomsel. PT.	
					- Indosat Ooredoo., PT.	
TOTAL YANG DIVALIDASI						2.576
TIDAK SESUAI ISR						1.260

6. IK-6 Persentase (%) berfungsi perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur.

Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik, merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya TUSI Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang, dalam rangka pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan agar tercipta tertib penggunaan frekuensi sesuai dengan peruntukannya. Sumber Daya Manusia yang tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan berpengaruh kepada kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi UPT di lapangan terutama pada kegiatan observasi/pengukuran maupun penanganan gangguan penggunaan frekuensi radio serta kegiatan lainnya

yang membutuhkan alat ukur/perangkat pendukung kegiatan observasi/monitoring.

Dari penetapan kinerja Tahun 2018, agar kegiatan berjalan dengan optimal, ditentukan target capaian kinerja terkait berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitor/ukur sebesar 83,00%. Dengan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin terhadap perangkat/peralatan pendukung kegiatan observasi dan monitoring, maka kondisi perangkat/peralatan dapat terpelihara baik, dan selalu siap dipergunakan pada saat dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Petugas yang diberikan tanggung jawab terkait dengan pemeliharaan perangkat secara rutin menyampaikan laporan kondisi perangkat setiap bulan, dan bekerja sama dengan para fungsional pengendali frekuensi melakukan inventarisir perangkat yang mengalami kerusakan untuk segera dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tabel 3.7
Jadwal Pemeliharaan Perangkat Pendukung SMFR dan
alat monitoring/ukur Tahun 2018

No.	Periode pemeliharaan	Hasil Pemeriksaan Perangkat Transportabel					
		Stasiun Transportable Lubuk Linggau		Stasiun Transportable Prabumulih		Stasiun Transportable Pangkalan Balai	
		Perangkat Utama	Perangkat Pendukung	Perangkat Utama	Perangkat Pendukung	Perangkat Utama	Perangkat Pendukung
1.	Tanggal 01 – 03 Maret 2018	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.	Tanggal 27 – 29 Maret 2018	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3.	Tanggal 05 – 07 Maret 2018	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4.	Tanggal 15 – 18 September 2018	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Dari 10 (sepuluh) Alat Ukur yang ada, 9 (Sembilan) atau 90,00% diantaranya berada dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam kegiatan observasi dan pengukuran di lapangan. Perhitungan indikator capaian kinerja untuk persentase berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan penerbitan penggunaan frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio	Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT	83%	90,00%	108,43%

Tabel 3.8
Daftar Alat Ukur dan Kondisi

No.	Merk/Type	Range Frekuensi	Jumlah	Keterangan (Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat)
1	Agilent / N9340B	100 KHz – 3 GHZ	1	Baik
2	Agilent / N 93445	1 MHz – 20 MHz	1	Baik
3	Keysight / 9918A	26 GHz	1	Baik
4	Keysight / N9961 A	444 GHz	1	Baik
5	Keysight / N9938 A	26 GHz	1	Baik
6	Portabel Receiver / PR 100	20 MHz – 7,56 GHz	2	1 Baik, 1 Rusak Ringan
7	TV Analyzer / Rover HD Tab 9	4 MHz – 2250 MHz	1	Baik
8	Agilent / N 9010 P	9 KHz – 26,5 GHz	1	Baik
9	Anritsu / MS 2667 C	9 KHz – 26,5 GHz	1	Baik
10	Anritsu / MS 2667 E	9 KHz – 3 GHz	1	Baik

7. IK-7 Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT

Penyampaian SPP, ST maupun ISR oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang, untuk tahun 2018 sebagian besar masih dilakukan secara manual melalui Pos dan Jasa Titipan ataupun disampaikan secara langsung oleh petugas dari UPT ke Perusahaan/pemegang ISR. Untuk mempermudah proses perizinan Ditjen SDPPI memberikan fasilitas pelayanan kepada para Pemegang ISR bisa mengunduh SPP melalui email dengan syarat Pemegang ISR sudah mempunyai akun, dengan demikian diharapkan pembayaran SPP dilakukan tepat waktu oleh pemegang ISR, disamping untuk menghindari kemungkinan pencabutan izin (revoke) yang disebabkan oleh kelalaian/keterlambatan pemegang ISR memenuhi kewajiban membayar biaya Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi seyogyanya dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat termasuk para pengguna frekuensi radio, sehingga perizinan yang sebelumnya dianggap rumit dan bertele-tele diharapkan berjalan lebih cepat dengan pelayanan berbasis online.

Dengan mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018, target yang ditentukan untuk pendistribusian SPP, ST dan ISR sebesar 100,00%, dan sampai dengan akhir tahun anggaran target tersebut dapat dicapai dengan capaian realisasi sebesar 100,00%.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan penerbitan penggunaan frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio	Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST, dan ISR oleh UPT.	100,00%	100,00%	100,00%

Data Pendistribusian SPP, ST dan ISR oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Palembang periode tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Data Pendistribusian ISR, SPP, ST Tahun 2018

No	Uraian	Bulan												Jumlah 2018
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	ISR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SPP	64	34	39	73	42	31	62	42	47	55	36	51	576
3.	ST	9	14	15	14	11	17	10	15	14	8	10	13	150
	Total	73	48	54	87	53	48	72	57	61	63	46	64	726

Khusus untuk Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana data tersebut diatas tidak ada realisasi pengiriman ISR, dikarenakan ISR tidak lagi disampaikan melalui Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang, namun langsung dikirimkan oleh Ditjen SDPPI ke akun/email masing-masing perusahaan/pemilik ISR.

8. IK-8 Persentase (%) terlaksananya kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

Keberadaan para anggota Amatir Radio di Indonesia dihimpun dalam suatu wadah yakni Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) yang merupakan wadah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan para calon anggota Amatir Radio. Sebelum menjadi anggota Amatir Radio, calon anggota diharuskan melewati tahapan dan persyaratan yakni harus mempunyai Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio yang dapat diperoleh setelah dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Negara Amatir Radio, yang selanjutnya diberikan hak untuk mengembangkan hobby khususnya yang berkaitan dengan teknik radio serta melakukan komunikasi radio dengan sesama anggota Amatir Radio lainnya baik di Indonesia maupun mancanegara dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dengan mengacu pada target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018, untuk Ujian Negara Amatir Radio ditetapkan yakni 100,00%, sesuai dengan program kerja tahun anggaran 2018, jumlah kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) sebanyak 1 (satu) kegiatan dan telah dilaksanakan. Adapun hasil pelaksanaan ujian, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Hasil Pelaksanaan Kegiatan UNAR
Di Prabumulih tanggal 15 April Tahun 2018

No	Tingkat	Jumlah Peserta Ujian	Jumlah Peserta yang Lulus	Keterangan
1	Siaga	180	176	
2	Penggalang	22	22	
3	Penegak	-	-	

Keinginan Masyarakat/calon Amatir Radio di wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih cukup tinggi untuk mengikuti kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), sehingga kemudian sempat diusulkan agar dilaksanakan lagi Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) pada akhir tahun 2018, namun tidak bisa terealisasi dikarenakan keterbatasan anggaran, dan hasil koordinasi dengan kantor pusat yang pada intinya tidak memungkinkan lagi dilaksanakan kegiatan tambahan untuk Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).

SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR YANG EFISIEN, BERSIH DAN EFEKTIF.

1. IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang PNBH BHP Frekuensi Radio

Untuk tahun 2018 telah dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang PNBH BHP Frekuensi Radio sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan menindaklanjuti permintaan dari KPKNL dengan total jumlah Wajib Bayar sebanyak 5 (lima) Client/perusahaan. Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir jumlah Piutang PNBH yang tidak tertagih, sebagai akibat kelalaian Pemegang ISR untuk membayar BHP Frekuensi tepat waktu.

Tabel 3.11

Data Pelaksanaan Pendampingan Pelimpahan Piutang BHP Tahun 2018

No.	Uraian	Bulan		Jumlah
		Juli	Desember	
1.	Permintaan Pendampingan Oleh KPKNL	Surat KPKNL No. S-1198/WKN.4KNL.02/2018 Rencana penagihan langsung.	Surat KPKNL No. S-2203/WKN.4/KNL.02/2018 perihal Permintaan pendampingan kunjungan lapangan	- PT. Pertamina Retco Prima Energy - PT. Radio Dian Bahagia Sentosa - PT. Radio Meswara Santika
2.	Pelaksanaan Pendampingan	SPT No.139/Balmon.16/Kominfo/SPT/07/2018 tanggal 01 s.d.03 Agustus 2018 di Kota Prabumulih dan Kab. Muara Enim	SPT No.265/Balmon.16/SPT/12/2018 tanggal 17 s.d 19 Desember 2018 di Kota Prabumulih	- PT. Servo Resource - PT. Pertamina Retco Prima Energy - PT. Global Security Service - PT. Radio Meswara Santika - PT. Tata Mulia Nusantara
	Capaian	100%	100%	

Tabel 3.12
Data Pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan Piutang BHP Tahun 2018

No.	Pelaksanaan	Perusahaan/ Pemegang ISR	Nilai Tunggalan	Hasil	Keterangan
1.	01 – 03 Agustus 2018	PT. Servo Buana Resource	Rp. 9.335.301,-	Tidak beroperasi lagi dan alamat kantor pusat berada di Jakarta.	KPKNL Palembang akan segera menindaklanjuti dengan mengirim surat secara ke Kantor Pusat tersebut.
		PT. Pertamina Retco Prima Energy Kota Prabumulih	Rp. 4.358.919,-	Tidak beroperasi lagi	KPKNL Palembang akan mengirim surat ke PT Pertamina untuk meminta penje-lasan secara tertulis tentang status hutang dari PT. Pertamina Retco Prima Energy.
		PT. Global Security Service Indonesia Cab. Prabumulih	Rp. 253.281,-	Lunas	-
		PT. Radio Meswara Santika	Rp. 5.033.367,-	Tidak beroperasi lagi	Pihak KPKNL Palembang akan menindaklanjuti
		PT. Tata Mulia Nusantara	Rp. 402.317,-	Lunas	-
2.	17 – 19 Desember 2018	PT. Pertamina Retco Prima Energy Kota Prabumulih	Rp. 4.358.919,-	Tidak beroperasi lagi	KPKNL Palembang akan mengirim Surat ke PT. Pertamina untuk meminta penjelasan secara tertulis tentang sttus hutang dari PT. Pertamina Retco prima Energy
		PT. Radio Dian Bahagia Sentosa	Rp. 5.008.647,-	Tidak beroperasi lagi	Pihak ahli waris dari penanggungjawab atau pemilik merasa keberatan untuk melakukan pembayaran dikarenakan tidak mampu.
		PT. Radio Meswara Santika	Rp. 5.033.367,-	Tidak beroperasi lagi	Pihak KPKNL Palembang akan menindaklanjuti dengan mencari alamat penanggungjawab perusahaan tersebut.

2. IK-1 Persentase (%) Layanan Administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Layanan Administrasi dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya Tugas dan Fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang yakni pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Sumatera Selatan melalui kegiatan Observasi dan Monitoring, Pengukuran, Validasi data pengguna frekuensi serta Penertiban Pengguna Frekuensi Radio. Tanpa adanya dukungan layanan administrasi yakni ketersediaan anggaran serta sumber daya lainnya kegiatan operasional sebagaimana tersebut diatas tidak akan berjalan dengan optimal.

Dengan mengacu pada kinerja ketatausahaan dan Urusan Rumah Tangga, target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja ini telah tercapai yakni sebesar 100%, yang dilaksanakan melalui:

a. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) disusun pada tahun sebelumnya yang diawali dengan pagu Indikatif sampai dengan tahapan finalisasi, sehingga perencanaan anggaran seyogyanya telah dilaksanakan dengan matang dengan memperhatikan kebutuhan/skala prioritas dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang. Untuk Tahun Anggaran 2018 Balai Monitor Spektrum memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 11.012.187.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Rupiah Murni (RM) Rp. 4.389.544.000,-
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 6.622.643.000,-

Dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi perubahan keadaan atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan. Dalam hal ini perlu dilakukan revisi untuk menyesuaikan kegiatan yang mungkin terjadi perubahan dan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ada beberapa pertimbangan perlunya dilakukan revisi anggaran, diantaranya :

- Antisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan;
- Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan;
- Mempercepat pencapaian kinerja K/L;
- Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas dan meningkatkan kualitas belanja APBN.

Dalam tahun Anggaran 2018, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan/program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang melakukan 7 (tujuh) kali Revisi Anggaran yang terdiri dari

- 6 (enam) kali Revisi DIPA, yang merupakan Kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
- 1 (satu) kali Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang merupakan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Seringnya terjadi revisi harus menjadi perhatian dan evaluasi bersama, apalagi revisi menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.

b. Pengelolaan Keuangan dan Urusan Rumah Tangga

Dari dana yang ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp. 11.012.187.000,-, dialokasikan dengan komposisi sebagai berikut:

- Belanja Pegawai (51) Rp. 3.229.370.000,-
- Belanja Barang (52) Rp. 7.057.287.000,-
- Belanja Modal (53) Rp. 765.530.000,-

Realisasi pelaksanaan anggaran/keuangan selama tahun anggaran 2018 sebesar 94,86%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar 91,38% atau Rp. 9.049.614.973,- dari total pagu anggaran Rp. 9.903.582.000,- terdapat kenaikan realisasi anggaran sebesar 3,48%.

Tabel 3.13
TABEL REALISASI ANGGARAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS I PALEMBANG Tahun 2018 BERDASARKAN JENIS BELANJA

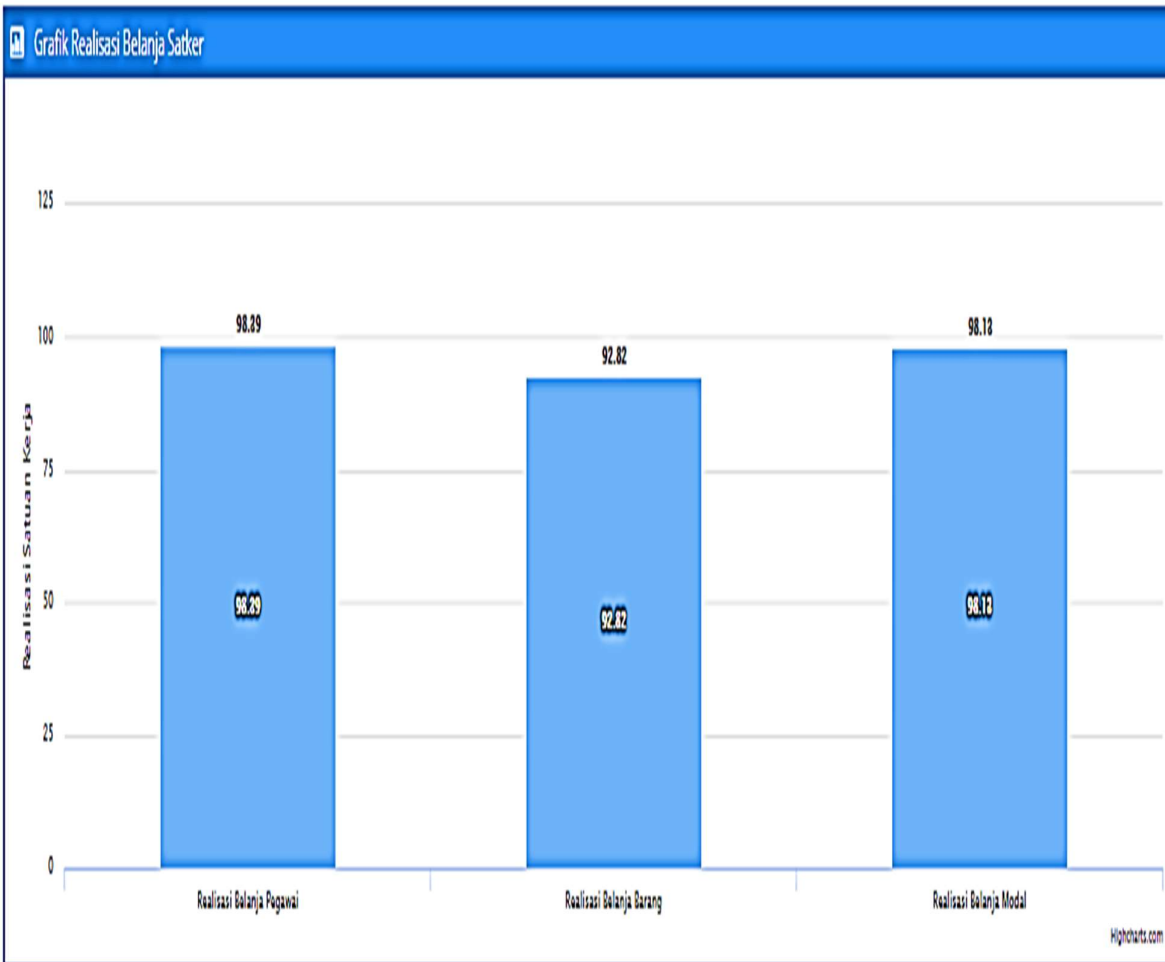
Kategori	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.229.370.000	3.177.273.329	98,39
Belanja Barang	7.081.455.000	6.572.676.992	92,82
Belanja Modal	741.362.000	727.485.870	98,13
Total	11.052.187.000	10.477.436.191	94,8

Tabel 3.14

**TABEL REALISASI ANGGARAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS I PALEMBANG Tahun 2018 BERDASARKAN OUTPUT KEGIATAN**

Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
3053.012	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Palembang	1,207,900,000	1,032,962,786	85.52
3053.049	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Palembang	74,700,000	70,357,902	94.19
3053.078	Dukungan Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio UPT Ditjen SDPPI	3,747,135,000	3,577,431,417	95.47
3053.951	Layanan Internal	741,362,000	727,485,870	98.13
3053.994	Layanan Perkantoran	5,281,090,000	5,075,480,121	96.11
JUMLAH		11,052,187,000	10,483,718,096	94.86

**GRAFIK REALISASI ANGGARAN
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
BERDASARKAN JENIS BELANJA**



— Sumber Data: SPAN Kementerian Keuangan

c. Penatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga salah satu fungsinya melaksanakan urusan ketatausahaan dan Rumah Tangga di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang. Dengan demikian pengelolaan dan penatausahaan kepegawaian serta kearsipan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang menjadi tanggung Jawab Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Kegiatan yang terkait dengan penatausahaan dan pengelolaan kepegawaian diantaranya meliputi Pengembangan SDM melalui Diklat/Kursus/ Bimtek dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian diantaranya usulan kenaikan pangkat/kenaikan gaji berkala, usulan pemberian penghargaan, mutasi pegawai serta pengelolaan database kepegawaian. Pada tabel berikut ini dapat dilihat komposisi SDM Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2018 yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang yang didistribusikan/ dikelompokkan kedalam jabatan/unit/seksi sebagai berikut:

□

Tabel 3.15

**KOMPOSISI SDM BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO KELAS I PALEMBANG SESUAI JABATAN/SEKSI**

NO	JABATAN/UNIT	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		PNS	CPNS	
1.	Kepala UPT	1	-	1
2.	Tata Usaha dan URT	7	-	7
3.	Seksi Pemantauan dan Penertiban	3	2	5
4.	Seksi Sarana dan Pelayanan	4	-	4
5.	Kelompok Jabatan Fungsional	10	-	10
	JUMLAH	25	2	27

Bagi pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang yang telah memenuhi persyaratan diantaranya masa kerja dan ketentuan lain yang berlaku selama tahun 2018, telah diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala serta Penghargaan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.16
Data Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai Tahun 2018

No	Nama / NIP	Uraian Kenaikan Pangkat	TMT	Masa Kerja
1.	Ir. Muhammad Sopingi, MM NIP.196608261994031001	IV/a ke IV/b	01 April 2018	24 Tahun
2.	Tarno, SH.. NIP.196511241990031001	III/c ke III/d	01 Oktober 2018	28 Tahun
3.	Japriansyah NIP.196701121989031002	III/c ke III/d	01 Oktober 2018	29 Tahun
4.	Berlan NIP.196812171990031001	III/c ke III/d	01 Oktober 2018	28 Tahun
5.	Rully, A.Md NIP.198203062006041002	III/a ke III/b	01 Oktober 2018	12 Tahun

Tabel 3.17
Data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Tahun 2018

No	Nama / NIP	Gol/Ruang	TMT	Masa Kerja
1.	Supardi., SH., MH. NIP. 196209071985031002	Pembina, IV/a	01 Maret 2018	33 TH
2.	Edy Syukur, ST., MT. NIP.196003131990031002	Pembina, IV/a	01 Maret 2018	28 TH
3.	Saudi, ST., MT NIP.197007051994031004	Penata Tk.I, III/d	01 Maret 2018	24 TH
4.	Tarno NIP.196511241990031001	Penata, III/c	01 Maret 2018	28TH
5.	Japriansyah NIP.196701121989031002	Penata, III/c	01 April 2018	29 TH
6.	Rully, A.Md NIP.198203062006041002	Penata/III.c	01 April 2018	12 TH
7.	Slamat Rustandi Nip. 196510052007011006	Pengatur, II/c	01 Januari 2018	11 TH

Tabel 3.18
Data PNS Balai Monitor Kelas I Palembang
Penerima Peghargaan Tahun 2018

No	Nama	Gol / Ruang	Jenis Penghargaan
1.	Ir. Muhammad Sopingi, MM NIP. 196608261994031001	Pembina Tk.I, IV/ b	Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun
2.	Adnan, SE NIP.196102061986031005	Penata TK.I, III/d	Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun
3.	Megawati, SH NIP.196509231986032004	Penata TK.I, III/d	Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun
4.	Agus Sumitro, S.Kom NIP. 198108102006041002	Penata, III/c	Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun
5.	Halimatussadia, SE NIP. 197103052006	Penata Muda Tk.I, III/b	Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun

Dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, maka pengelolaan arsip berbasis teknologi secara efektif, efisien, dan terpadu telah dilaksanakan secara bertahap sehingga pengelolaan arsip yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi, mudah diakses, sesuai dengan peraturan perundangan dan standar kearsipan. Pengelolaan arsip yang dilakukan dengan baik, ikut menunjang kelancaran aktivitas operasional perkantoran sehari-hari, yang ditandai dengan kemudahan akses dan menemukan data/dokumen arsip pada saat dibutuhkan.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bimbingan teknis (bimtek), merupakan bagian pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta

kemampuan sumber daya manusia yang dapat digunakan memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun instansi tertentu. Sehingga dengan mengikuti diklat dan bimtek diharapkan setiap individu maupun instansi tertentu, baik swasta maupun lembaga pemerintahan, dapat mengambil sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja.

Menghadapi kenyataan bahwa semakin tingginya tingkat kompetensi yang dibutuhkan, maka tentunya pendidikan pelatihan pengembangan sumber daya manusia ataupun bimtek telah menjadi sebuah kebutuhan untuk individu, instansi, ataupun lembaga pemerintahan. Dalam usaha meningkatkan kualitas SDM, maupun peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang telah menugaskan para Pegawainya untuk mengikuti kegiatan pembinaan, konsultasi maupun koordinasi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.19**Data Pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Workshop Tahun 2018**

Jenis Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Jumlah Pegawai	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	Slamat Rustandi	30 Januari – 01 Februari 2018	Tangerang
Sosialisasi keputusan Menteri Kominfo No. 171 Tahun 2018	Salman, ST, MT Sutarta	4-6 Maret 2018	Tangerang
Workshop pengisian e-LHKPN di lingkungan Ditjen SDPPI	Saudi, ST, MM Slamet Suharto, ST, MM Tomy Purnawan, SE	15-17 Maret 2018	Bandung
Sosialisasi terkait anggaran dan revisi anggaran TA 2018 di Lingkungan SDPPI	Yosi Syahrani, SE, MM Slamet Suharto, ST, MM Tomy Purnawan, SE	11-13 April 2018	Bandung
Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 dan diskusi pengadaan Barjas dan Outbond 2018	Slamet Suharto, ST, MM Agus Sumitro, S.Kom Rully, A.Md	07-12 Mei 2018	Bali
Sosialisasi penyelenggaraan layanan panggilan darurat 112 dan persiapan Asian Games	Salman, ST, MT	04 Mei 2018	Palembang
Sosialisasi pelatihan lomba video profile oleh Tim Rekam Indonesia	Sutarta	21-23 Mei 2018	Jakarta
Sosialisasi pengelolaan keuangan Ditjen SDPPI	Slamet Suharto, ST, MM Tomy Purnawan, SE Evi Fitri Yanti	23-25 Mei 2018	Bogor
Bimtek SIMAN fitur pengelolaan dan bimtek teknis SIMAK BMN dan persediaan	Dian Maya Sakti Slamat Rustandi	01-04 Juli 2018	Makassar

Jenis Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Jumlah Pegawai	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Bimtek SIMAYA	Halimatusa'dia, SE Slamat Rustandi Nurul Imanita Aprilia	09-11 Juli 2018	Jakarta
Pelatihan survival management Batch IV	Yosi Syahroni, SE	08-12 Juli 2018	Jakarta
Workshop pemeliharaan SMFR	Ilhamyash, ST, MM	16-21 Juli 2018	Bali
Pelatihan pengukuran radio siaran Ditjen SDPPI Batch II Tahun 2018	Muchari, S.Kom	15-29 Juli 2018	Bogor
Sosialisasi frekuensi radio	Ir. Muhammad Sopingi, MM Supardi, SH, MH Salman, ST, MM Ilhamyash, ST, MM Saudi, ST, MM Fimansyah, SH, MH Megawati, SH Slamet Suharto, ST, MM Tarno, SH Muchari, S.Kom Agus Sumitro, S.Kom Berlan Halimatusa'dia, SE Rully, A.Md Sutarta Samsiah	12 Juli 2018	Palembang
Survival Managemet Training Batch V	Supardi	29 Juli-03 Agustus 2018	Jakarta
Bimtek e-penyiaran sebagai narasumber	Salman, ST, MM Muchari, S.Kom	08 Agustus 2018	Palembang
Workshop kebijakan akuntansi Kemkominfo	Tomy Purnawan, SE Evi Fitri Yanti	08-08 September 2018	Surabaya
Sosialisasi reformasi Kemkominfo dan koordinasi terkait dengan kepegawaian	Yosi Syahroni, SE	08-08 September	Tangerang Jkt
Workshop penerapan OSS pada perizinan frekuensi radio bagi petugas SIMS	Muchari, S.Kom Sutarta	12-14 September 2018	Tangsel
Pelatihan perangkat wireless training bersama Ditjen SDPPI	Rully, A.Md	12-14 Sept 2018	Jakarta
Workshop penyusunan e-SKP 2018	Yosi Syahroni, SE	09-11 September 2018	Bandung

Jenis Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Jumlah Pegawai	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Diklat PPK	Slamet Suharto, ST, MM	23-29 Sept 2018	Bogor
Sosialisasi Perpres No.16 Th. 2018 tentang pengadaan barjas dan peraturan turunannya berupa 13 peraturan LKPP	Ir. Muhammad Sopingi, MM Yosi Syahrani, SE Agus Sumitro, S.Kom Tomy Purnawan, SE	24-26 Sept 2018	Bogor
Workshop pengisian e-LHKPN	Slamet Suharto, ST, MM Salman, ST, MT	01-02 Okt 2018	Bandung
Workshop pemeliharaan SMFR	Ilhamsyah, ST, MM	01-05 Okt 2018	Yogyakarta
Workshop penyusunan LAKIP UPT	Ir. Muhammad Sopingi, MM Yosi Syahrani, SE Halimatusa'dia, SE	02-03 Okt 2018	Bogor
Workshop e-Licensing IWR-KRAP dan e-Licensing Kalibrasi perangkat	Muchari, S.Kom	08-10 Okt 2018	Depok
Pelatihan pengukuran radio siaran Ditjen SDPPI Batch III th.2018	Aria Dinata, S.Kom	14-28 Okt 2018	Bogor
Sosialisasi dan evaluasi kenaikan pangkat elektronik periode Okt 2018	Ir. Muhammad Sopingi, MM	16-18 Okt 2018	Bogor
Workshop pelayanan perizinan SFR dan sertifikasi operator radio bagi UPT monitor SFR Ditjen SDPPI	Salman, ST, MT Ilhamsyah, ST, MM	24-26 Okt 2018	Yogyakarta
Sosialisasi frekuensi radio	Ir. Muhammad Sopingi, MM Salman, ST, MT Yosi Syahrani, SE, MM Ilhamsyah, ST, MM Muchari, S.Kom Tomy Purnawan, SE Slamet Suharto, ST, MM Agus Sumitro, S.Kom Sutarta Samsiah Dian Maya Sakti Gani Paidal Castro Nurul Imania Aprilia Dewi Fitri Yani Yesi Safitri	21-23 Nov 2018	Prabumulih
Sosialisasi panduan satgas saber pungi di Kemkominfo	Halimatusa'dia, SE	22-23 Nov 2018	Tangerang
Sosialisasi implementasi kartu kredit pemerintah dalam rangka penggunaan uang persediaan TA 2019	Halimatusa'dia, SE	28 Nov 2018	Palembang
Sosialisasi pengembangan Modul SMART DJA dan tindak lanjut LKIP tahun 2018	Yosi Syahrani, SE Halimatusa'dia, SE	03-05 Des 2018	Bogor
Pelatihan operasional SMSN	Aria Dinata, S.Kom	03-05 Des 2018	Bogor

Pengelolaan Kearsipan yang ada pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I meliputi Penanganan Surat Masuk dan Surat Keluar, serta Penerbitan Surat Keputusan, dengan rincian:

- Surat Masuk : 973
- Surat Keluar : 529
- Surat Keputusan : 28

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang yakni pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan pengadaan Barang dan Jasa dengan rincian sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

TABEL 3.20
MONITORING PENGADAAN B/J
TAHUN 2018 BALMON PALEMBANG

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA (PIHAK KETIGA)	JUMLAH BIAYA	NO KONTRAK	KETERANGAN
1.	PEMELIHARAAN GENSET	- Februari 2018 - Maret 2018 - April 2018	CV. ALDO DELTA TEKNIK TOKO SUMBER BARU CV. ALDO DELTA TEKNIK	3,535,000 1,305,000 1,900,000	- - -	
2.	PENCETAKAN KARTU PENGENAL PNS	22 Oktober 2018	PERC. GREFIK BERKAH	5,000,000	-	
3.	PENGADAAN SERAGAM TEKNIS	29 Oktober 2019	CV. RICKY TAILOR	28,750,000	-	
4.	KONSULTAN ISO	Apr - Jun 2018	CV. SMART KONSULTAN	48,235,000	-	
5.	PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN	04 Desember 2019	- CV. MAHARANI - CV. PRIMA - CV. ADAM LAS	12,093,000 2,000,000 24,650,000	- - -	
6.	INTERIOR RUANGAN PELAYANAN	04 Desember 2018	- CV. MAHARANI	17,292,000	-	
7.	PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH SLAVE	-	-	-	-	
8.	UJI FUNGSI PERANGKAT DALAM RANGKA	05 Desember 2019	PT. TEKNOLOGI CAHAYA CAHAYA INTEGRASI IND.	98,000,000	38/Balmon.16/Kominfo/PPK/SPK/11/2018, Tgl. 5 Nop 2018	
9.	PENINGKATAN DISIPLIN DAN BINTAL	9 - 12 Mei 2018	CV. SAKO HOLIDAYS	187,200,000	16/Balmon.16/Kominfo/PPK/SPK/5/2018, Tgl. 2 Mei 2018	
10.	RELOKASI PERANGKAT	29 nopember 2018	PT. WASAKA INDOMULYO	190,580,000	36/Balmon.16/Kominfo/PPK/SPK/10/2018, Tgl. 2 Okt 2018	

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA (PIHAK KETIGA)	JUMLAH BIAYA	NO KONTRAK	KETERANGAN
11.	PENGADAAN INVENTARIS KANTOR					
	- Alat Pengolah Data	25 Juni 2018	PT. AIRMAS MUSI TRINITY	48,400,000	-	
	- Filing Cabinet / Lemari Besi	04 Desember 2018	- CV. PRIMA	8,943,000	-	
12.	LOCAL AREA NETWORK (LAN)	10 Desember 2018	PT. ANTAR DATA SOLUSI NUSANTARA	9,993,225	-	
13.	PERANGKAT MONITORING	10 Desember 2018	PT. WASAKA INDOMULYO	22,990,000	-	
14.	LEMARI BESI PERANGKAT	10 Desember 2018	BENGKEL LASKAFFAH	19,000,000	-	
15.	SERTIFIKAT ISO	10 Desember 2018	PT. ENHALL MANDIRI 186	46,816,000	-	
16.	LAPORAN TAHUNAN	09 Juli 2018	CV. MERCUSUAR	13,800,000	-	

Untuk menjaga kondisi peralatan/perlengkapan inventaris kantor agar dalam kondisi baik selama tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi secara rutin melakukan kegiatan pemeliharaan sehingga peralatan yang ada selalu siap dipakai pada saat diperlukan. Kegiatan pemeliharaan ini harus dilakukan secara periodik, untuk menghindari kerusakan barang inventaris yang akhirnya akan berdampak mengganggu pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari perkantoran ataupun kegiatan dilapangan.

B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan di bidang Telekomunikasi

Dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat khususnya para pengguna frekuensi radio pada tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Telekomunikasi, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan frekuensi radio. Kegiatan telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan tempat pelaksanaan Kota Prabumulih pada tanggal 22 Nopember 2018 di Hotel Grand Nikita dengan jumlah peserta $\pm$ 34 orang.

2. Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio dalam rangka Event Asian Games

Kegiatan pesta olahraga terbesar Asia Games XVIII berlangsung pada tanggal 18 Agustus s.d. 02 September 2018 di Jakarta - Palembang. *Multi-event* terbesar di Asia tersebut selesai dilaksanakan dan sukses baik dari segi penyelenggaraan maupun prestasi karena dalam sejarah baru pertama kali Indonesia berada di Empat Besar dengan raihan 31 Emas dibawah China, Jepang dan Korea Selatan.

Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah menggantikan posisi Hanoi, Vietnam yang sebelumnya ditunjuk menjadi penyelenggara namun kemudian menyatakan mengundurkan diri. Kesuksesan pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya infrastruktur yang memadai, serta dukungan dari berbagai pihak yang turut memberikan kontribusi secara maksimal sehingga event akbar ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai dengan berakhirnya kegiatan Asian Games.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang turut memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Event dimaksud dengan melaksanakan kegiatan observasi dan Monitoring terhadap kanal frekuensi yang digunakan selama kegiatan Asian Games XVIII berlangsung, guna menjamin kelancaran komunikasi selama event berlangsung, dengan tahapan sebagai berikut:

- Melaksanakan observasi dan pengukuran pada range frekuensi yang digunakan dalam event Asian Games;
- Identikasi sinyal dan modulasi penggunaan frekuensi pada range frekuensi yang telah ditetapkan termasuk juga koordinat lokasi pengukuran;
- Melaporkan secara periodik hasil pelaksanaan kegiatan.

3. Sertifikasi ISO 9001:2015

Pemerintah melalui Nawacita telah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Mutu dan keandalan suatu jasa pelayanan akan diakui oleh semua pihak yang berkepentingan apabila jasa tersebut sesuai dengan yang standar yang diinginkan oleh publik. Standar sistem manajemen mutu mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan pelayanan publik. Dalam upaya menetapkan kualitas di suatu institusi pemerintah perlu dilakukan langkah-langkah nyata dalam penerapan standar sistem manajemen mutu.

Banyak cara yang dilakukan untuk menunjukkan adanya perubahan peningkatan pelayanan masyarakat misalnya dengan modernisasi sarana pelayanan, penetapan komitmen pelayanan yang diantaranya dilakukan melalui standardisasi dengan sistem ISO, yang untuk pelayanan publik di kantor pemerintah dikenal juga dengan ISO 9001-2015. ISO sendiri merupakan singkatan dari International Organization for Standardization.

Rencana Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang untuk memperoleh sertifikasi ISO:2015 ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dengan CV. Smart Consultant untuk melakukan pendampingan sebagai persiapan sebelum dilakukan Audit, pelaksanaan pendampingan ini dilakukan pada bulan 09 s.d. 12 April 2018.

Pada tahapan berikutnya dilakukan Audit oleh Lembaga Sertifikasi yakni PECB, untuk menilai kelayakan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2015, pelaksanaan Audit Sertifikasi dimaksud dilaksanakan pada tanggal Agustus 2018, dan dari Hasil Audit Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dinyatakan *memenuhi syarat dan dapat diberikan Sertifikat ISO 9001:2015*, yang telah diserahkan pada tanggal 03 Desember 2018.

dengan ketentuan akan dilakukan Audit kembali pada 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila hasil audit tidak memenuhi syarat sertifikat audit akan dicabut.

C. Analisa dan Evaluasi

1. Pengaruh Kondisi dan Faktor yang bersifat Internal (*Internal Factor Analysis Summary/IFAS*).

- Secara umum anggaran tersedia dalam jumlah yang memadai
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebelum disahkan melalui Undang-Undang APBN telah dilakukan pembahasan melalui tahapan demi tahapan mulai dari penentuan pagu awal DIPA, dilanjutkan dengan pagu indikatif/ sementara sampai dengan tahapan finalisasi RKAKL, dengan dilakukan pembahasan yang demikian, seyogyanya menghasilkan program kerja yang matang.

- Prasarana dan perlengkapan yang tersedia dalam kondisi terpelihara dan terawat dengan baik

Dari komponen pembiayaan dan penganggaran yang ada selain dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional juga digunakan untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan secara periodik sehingga peralatan dan perlengkapan yang ada selalu dalam keadaan baik dan terpelihara, serta selalu siap pada saat dibutuhkan. Mengantisipasi perkembangan teknologi dalam batas-batas tertentu peralatan yang ada untuk keperluan pengukuran dapat diupgrade.

- Regulasi dibidang telekomunikasi ikut menunjang dan berperan dalam peningkatan kinerja institusi/ lembaga

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999, beserta peraturan pelaksanaan yang ada dibawahnya mengatur serta mengawasi serta mengendalikan penggunaan frekuensi radio agar sesuai dengan peruntukannya serta dimanfaatkan selanjutnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio harus dilakukan dengan efisien dan dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi yang selanjutnya akan

dipergunakan bagi peningkatan dan pembangunan infratraktur khususnya di bidang Telekomunikasi.

- Koordinasi Internal Organisasi berjalan dengan baik

Secara umum koordinasi internal di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika berjalan dengan baik. Kegiatan pembinaan terhadap Satker yang ada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dilaksanakan secara rutin, demikian pula pada tingkat Eselon I, Ditjen Sumber Daya dan perangkat Pos dan Informatika kegiatan yang bersifat koordinatif dan pembinaan juga secara rutin dilaksanakan baik yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi UPT maupun yang terkait dengan keuangan/penganggaran. Dengan demikian diharapkan kegiatan dapat berjalan baik dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- Penerapan system penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya diterapkan

Penganggaran secara de jure sudah berbasis kinerja, namun dengan keterbatasan alokasi anggaran, kemungkinan penambahan anggaran pada usulan perhitungannya lebih didasarkan atas prosentase saja. Dengan kondisi geografis Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah 17 kabupaten/kota sebagai contohnya setidaknya jumlah kegiatan Observasi dan Monitoring berjumlah paling sedikit 17 atau lebih, dengan pertimbangan ada Kabupaten karena wilayah yang lebih luas dari Kabupaten lain sehingga perlu penambahan kuantitas kegiatan.

- Adanya kebijakan penghematan.

Pemerintah dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mempunyai kebijakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di segala bidang, namun dengan kondisi dana yang sangat terbatas maka setiap kementerian mengalami pengurangan/penghematan anggaran, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terkena dampak pemotongan/penghematan anggaran. Akibat dari pemotongan anggaran ada sebagian kegiatan yang terpaksa dikurangi untuk memenuhi alokasi dana yang mengalami pengurangan.

- Usulan Penambahan Anggaran/Jumlah Kegiatan

Dengan pertimbangan kompleksnya pelaksanaan kegiatan dari waktu ke waktu yang harus diiringi dengan peningkatan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, dan dengan kondisi luas wilayah yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota serta tingkat kepadatan penggunaan frekuensi yang cukup tinggi diperlukan penambahan kegiatan yang ada dalam program kerja dengan tetap mempertimbangkan aspek efisiensi.

2. Pengaruh Kondisi dan Faktor yang bersifat Eksternal (*Eksternal Factor Analysis Summary/EFAS*)

- Kerjasama dan koordinasi dengan mitra kerja

Kerjasama serta koordinasi dengan mitra kerja harus dibina, baik dengan pemerintah daerah setempat, para operator/pemegang ISR untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif. Inti dari fungsi koordinasi adalah komunikasi, karena dengan komunikasi kita mampu melakukan hubungan serta kerjasama yang baik dengan pihak-pihak lain. Koordinasi melalui komunikasi yang efektif akan menciptakan sinergi antar berbagai komponen yang terlibat untuk saling mendukung tercapainya sasaran dan tujuan bersama.

- Regulasi terkait revisi anggaran yang sangat ketat.

Ketatnya ketentuan yang mengatur tata cara revisi anggaran berdampak juga terhadap kurang optimalnya realisasi anggaran, akibatnya sisa anggaran tidak bisa dimanfaatkan dan direvisi atau dialihkan ke sektor/komponen lain yang sebenarnya masih membutuhkan penambahan biaya.

- Perkembangan Industri telekomunikasi

Industri telekomunikasi di Indonesia berkembang sangat pesat, pada dekade 1990-an, sarana komunikasi masih terbatas dan yang dipergunakan masyarakat serta dunia usaha terbatas pada HT, Radio Komunikasi SSB, pesawat telegram, telepon masih berbasis kabel. Kemudian muncul telepon seluler, penggunaan HT pun tinggal sedikit dan

kebanyakan di wilayah atau lokasi yang belum terjangkau jaringan telepon seluler.

Perkembangan teknologi diatas bersifat positif atau memberikan peluang ataupun tantangan, sebagai contoh transfer uang yang sebelumnya harus melalui teller bank cukup dilakukan melalui SMS Banking. Namun perlu diperhatikan juga perkembangan teknologi juga memiliki dampak negative misalnya pencurian data dengan cara melakukan pembobolan situs/web. Perkembangan teknologi bidang telekomunikasi sekarang sudah pada tahap 5G, dan sebagai institusi yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, peralatan serta sarana maupun prasarana yang dimiliki harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada, agar fungsi pengawasan dan pengendaliannya berjalan dengan efektif dan efisien, dalam mewujudkan tertibnya penggunaan frekuensi sesuai dengan peruntukannya serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

D. Capaian Kinerja Tahun 2018

- Secara umum kinerja pada Program Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio pada 17 kabupaten/Kota dapat dicapai sesuai dengan target/sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2018. Namun ditemukenal ada 1 (satu) kegiatan yang tidak mencapai target yakni Inspeksi Data ISR yang seharusnya 81% namun pada realisasinya hanya 52,34%, kegagalan pencapaian target ini disebabkan oleh berbagai Faktor diantaranya:
 1. Kegiatan Inspeksi Data ISR secara kuantitas jumlahnya belum memadai, khususnya kegiatan Inspeksi Data ISR di beberapa daerah dengan potensi pengguna yang relatif banyak.
 2. Data Hasil Kegiatan Inspeksi Data ISR sebagai hasil pemeriksaan di lapangan (on the spot) belum ditindaklanjuti dengan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data sehingga belum dapat diketahui jumlah data pengguna yang sudah menindaklanjuti hasil

inspeksi, pada data ini sangat penting untuk pemutakhiran data kinerja untuk kegiatan Inspeksi Data ISR.

- Kinerja Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi yang bersih, efektif dan Efisien yang meliputi 2 (dua) kegiatan yakni Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi radio dan Kegiatan Layanan Administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kedua sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 100%.

E. Perbandingan Data Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018						
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2017		2018	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan SFR serta penanganan gangguan frekuensi radio	1. Persentase (%) Jumlah Kab/Kota yang dapat dimonitor	80%	100%	80%	100%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan tv) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	64,51%	35%	47,72%
		3. Persentase (%) aduan/klaim gangguan yang dapat diselesaikan	93%	100%	94%	100%
		4. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah provinsi Sumsel	80%	100%	81%	100%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	80%	100%	83%	52,34%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat Monitoring/ukur di Balmon Kelas I Palembang	80%	100%	83%	90%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh Balmon Kelas I Palembang	-	-	100%	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	100%	100%	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2017		2018	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
2	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	1. % Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	85,4%	100%	100%
		2. Persentase (%) Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%

F. Strategi dalam meningkatkan Kinerja

1. Peningkatan koordinasi yang lebih baik baik internal maupun eksternal terutama yang terkait dengan penganggaran,
2. Kerjasama yang selama ini sudah terjalin baik dengan pemerintah daerah setempat agar terus dibina dan ditingkatkan, untuk mengantisipasi eksekusi yang mungkin timbul di lapangan.
3. Dalam upaya meningkatkan kinerja kegiatan Inspeksi Data ISR yang pada tahun 2018 di bawah target yang telah ditetapkan, akan dilakukan evaluasi kembali, hasil Inspeksi dengan para pengguna frekuensi ataupun pemegang ISR akan ditindaklanjuti lagi pada kesempatan berikutnya dengan melakukan pemanggilan ulang terhadap pemegang ISR untuk dilakukan pencocokan dan penelitian data (coklit) guna memastikan ISR yang ada sudah sesuai dengan yang ada di database pengguna frekuensi. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Operasi terkait dengan jumlah Sampling ISR yang menjadi target dalam pelaksanaan kegiatan Inspeksi yang seyogyanya disesuaikan dengan

jumlah kegiatan yang sudah dialokasikan dalam program kerja agar lebih proporsional.

4. Penambahan kegiatan operasional terkait pelaksanaan TUSI UPT Ditjen SDPPI akan diusulkan dalam pembahasan RKAKL pada periode berikutnya, jika tidak memungkinkan dilakukan penambahan akan diupayakan dengan mekanisme revisi DIPA dengan mengalihkan komponen pembiayaan pada kegiatan lainnya yang setelah diperhitungkan masih memiliki sisa pada akhir tahun anggaran.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang Tahun 2018 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan baik kegiatan operasional terkait pelaksanaan tugas dan fungsi maupun kegiatan yang bersifat administratif. LKIP ini merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dalam pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika.

LKIP Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LKIP ini menyajikan capaian kinerja (performance results).

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2018 ini menampilkan berbagai capaian yang tercermin dalam indikator kinerja utama maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Secara umum Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang telah dapat memenuhi target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Namun demikian, tidak seluruh target kinerja dapat direalisasikan sesuai yang direncanakan atau ditetapkan dan hal ini akan menjadi bahan evaluasi pada pelaksanaan program kerja pada tahun berikutnya, sehingga dapat berjalan dengan lebih baik.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja serta keberhasilan pelaksanaan program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang sangat diperlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan yang berhubungan Tugas dan Fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI agar berjalan dengan lebih baik lagi dengan tetap mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang, dalam usaha mengoptimalkan pelaksanaan program kerja, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik lagi, khususnya dengan instansi terkait baik internal maupun eksternal.
- b. Meningkatkan kemampuan SDM melalui kegiatan pembinaan, diklat, Bimtek dan workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun Ditjen SDPPI atau instansi lain yang berkompeten.
- c. Berupaya mengalokasikan penambahan anggaran untuk menambah kegiatan operasional yang setelah dievaluasi secara kuantitatif dianggap memerlukan penambahan kegiatan untuk mengoptimalkan kinerja, atau jika tidak memungkinkan Balai Monitor Kelas I Palembang akan berupaya dengan mekanisme revisi anggaran/DIPA.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan juga dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator indikator kinerja yang telah ada sesuai perkembangan tuntutan yang ada, sehingga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang dapat semakin dirasakan keberadaan serta manfaatnya oleh masyarakat khususnya para pengguna frekuensi radio dengan tetap mengedepankan pelayanan yang profesional.



DAFTAR LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA

2018

LAMPIRAN I

Balmon SFR Kelas I Palembang





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sopingi

Jabatan : Kepala Balai Monitor Spektrekard Kelas I Palembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ismail

Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Ismail

Jakarta, Juli 2018

Pihak Pertama,



Muhammad Sopingi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PALEMBANG

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/keluhan yang diselesaikan	94%
		4. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	85%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola UPT MonSpekFredrad yang bersih, efisien dan efektif.	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	Rp. 11.012.187.000,-

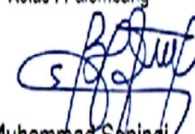
Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika



Ismail

Jakarta, Juli 2018

Kepala Balai Monitor Spektrefrad
Kelas I Palembang



Muhammad Sopingi



LAMPIRAN II

DOKUMENTASI 2018

SIKLUS KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGUNAAN FREKUENSI RADIO

OBSERVASI DAN MONITORING,
PENGUKURAN, PENANGANAN
GANGGUAN FREKUENSI RADIO
DAN INSPEKSI DATA ISR



OPERASI PENERTIBAN



TINDAK LANJUT
HASIL PENERTIBAN



PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBINAAN BERUPA UJIAN NEGARA AMATIR RADIO DAN SOSIALISASI TAHUN 2018



KEGIATAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO DI KAB. OKU SELATAN TAHUN 2018





**SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG TELEKOMUNIKASI Khususnya yang terkait dengan penggunaan frekuensi radio
PALEMBANG, 12 JULI 2018**



**KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN DAN PEMBINAAN MENTAL YANG
DILAKSANAKAN DI BALI TANGGAL 09 S.D. 12 MEI 2018**



**SERTIFIKASI ISO 9001:2015 DALAM UPAYA DAN KOMITMEN
MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT**

Kegiatan pendampingan oleh Smart Consultants dalam rangka persiapan sertifikasi ISO 9001:2015



Penyampaian Hasil Audit oleh Lembaga Sertifikasi PECB tanggal 20 September 2018



Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2015 pada tanggal 3 Desember 2018 oleh Perwakilan PECB Indonesia

**KEGIATAN OBSERVASI DAN MONITORING DALAM RANGKA
EVENT ASIAN GAMES XVIII TANGGAL 18 AGUSTUS S.D 02 SEPTEMBER 2018**

Kunjungan kerja Menteri Kominfo dalam rangka meninjau kesiapan pelaksanaan Asian Games XVIII di Palembang





